

# SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : JULI 2023

■ **Nusantara**  
**DPD RI Dorong Terwujudnya**  
**Sister City Indonesia-Jepang**

■ **Varia Senat**  
**Satu Jilid Lagi**  
**Antar Obligor BLBI**  
**ke Ranah Pidana**

SCAN  
ME  
!



**Apakah**  
**Hak PKI Ikut**  
**Dipulihkan?**

■ **Sekretariat Jenderal**  
**Digital Signage,**  
**Mempermudah**  
**Akses Informasi**  
**Seputar DPD RI**

**Gagasan** ■  
**Sah, Sistem Proposional**  
**Terbuka dan Kemenangan**  
**Demokrasi Indonesia**



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

**Mengucapkan**

**DIRGAHAYU**  
**BHAYANGKARA**



**POLRI PRESISI**  
**UNTUK NEGERI**

**1 JULI 1946 - 1 JULI 2023**

**PENASEHAT**

Rahman Hadi  
Lalu Niqman Zahir

**PEMIMPIN UMUM /  
PENANGGUNG JAWAB**

Mahyu Darma

**PEMIMPIN REDAKSI**

Taufik Jatmiko

**REDAKTUR PELAKSANA**

Budi Fitra Helmi

**REDAKTUR FOTO**

Rima Octaviani Dwiarti

**SEKRETARIS REDAKSI**

Theresia Oktavina

**STAF REDAKSI**

Betria Eriani, Adhelia Larasati,  
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho,  
Hestiana Kiftia Sari, Fandi Tri Prayogo,  
Nanda Russia Rola

**FOTOGRAFER**

N.Nurdianto, Lela Sadiyah,  
Dimas Yulian Santoso, Haryo C.Wicaksono,  
Andrianto, Surya Pongsitanan,  
Arifin Nur Wijaya, Prabandaru Ega Baskoro,  
Fikri Muftih Akbar, Mujiono,  
Unang Gunawan, Ryan Nur Fajry.

**NARASUMBER/  
KONSULTAN MEDIA**

Syafruddin Al, Syafril Amir, Boby Lukman  
dan Nuryanto (Desain Grafis)

**DISTRIBUSI**

Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI

**KANTOR REDAKSI**

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1  
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6  
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

ISSN 2978 - 3118

## Ratusan Pak Kades Terjerat Korupsi?

Setelah tujuh tahun mendapat kucuran dana desa dari pemerintah yang jumlahnya rata-rata mencapai Rp1 Miliar setiap desa, wajah desa semestinya sudah berubah. Kesejahteraan masyarakat desa tentu sudah semakin meningkat. Itulah kabar baiknya yang mesti kita dengar.

Namun, setelah tujuh tahun berlalu, kabar buruknya ternyata ada dan memprihatinkan. Ratusan kepala desa terjerat kasus korupsi. Dana desa yang mengucur tiap tahun ini, ternyata telah diselewengkan oleh sejumlah oknum kepala desa dan sebagian oknum aparatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 orang pelaku. Separo atau 50 persen di antara pelaku itu adalah kepala desa itu sendiri.

Dari segi jumlah, angka 400-an oknum kepala desa dari 70.000-an kepala desa di seluruh Indonesia yang harus berhadapan dengan hukum, memang masih kecil. Namun tetap memprihatinkan. Kasus korupsi ini dikhawatirkan akan terus menggurita sepanjang waktu.

Penyebabnya? Meski sudah ada aturan yang superketat dan malah terkesan tumpang tindih, namun dana desa tidak hanya mengundang selera oknum kades dan oknum aparatnya. Dari luar, cukup banyak juga mata yang meliriknya. Ada oknum yang mengatasnamakan LSM, ada oknum yang berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri dan oknum yang mengatasnamakan institusi tertentu. Di Aceh, misalnya, sebagaimana diutarakan anggota DPD RI Sudirman, malah ada kepala desa satu kabupaten yang 'dipaksa' ikut bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan pihak swasta di luar kota yang jauh dan membandrol sumbangan sampai Rp25 juta/desa.

Jadi, dana desa bagi seorang kepala desa bukan hanya seperti bak kata bijak; 'hari panas nira disandang'. Karena kehausan, nira di pangkuan itu terus diteguk. Namun harus diakui ada juga keadaan 'memaksa' yang membuat para kepala desa menyelewengkan dana desa. Bayangkan, honor kepala desa yang tidak sebanding dengan seabrek beban yang dipikulnya, bagaimana mungkin mereka (Pak Kades) bisa menghadapi oknum-oknum yang 'berke-liaran' menemui kepala desa dengan berbagai alasan pula.

Di lain pihak, dalam sebulan, ada pula sepuluh sampai belasan kali pesta warga yang mengundang kepala desa. Namanya saja orang nomor satu di desa, tentu amplop pemberiannya tidak bisa sama dengan orang kebanyakan, apalagi kalau sampai memberikan amplop kosong. Apa kata dunia?

Ini adalah problem. Ini perlu diatasi dengan bijak. Harapannya, di samping gaji pokok dan tunjangan, apakah mungkin kepala desa diberi pula dana taktis seperti Pak Bupati dan Pak Gubernur untuk menjaga wibawa dan nafsu tindak kecurangan kepala desa. Setuju?

**Pemred**





**SENAT UTAMA**

6



- DANA DESA TERUS DIKORUP?
- Berbagai Persoalan Melilit Pemerintah Desa  
Pak Kades Tak Perlu Takut!
- Ratusan Kades Terlibat Korupsi Dana Desa
- Kades di Aceh Dipaksa Ikut Bimtek Swasta
- Realisasi Penyaluran Dana Desa Masih Rendah
- Ada Kades Tak Ingin Desanya Maju
- DPD RI Prihatin Banyak Kades Terjerat Korupsi
- Senator Usulkan Dana Operasional Desa Dinaikkan
- Revisi UU Desa Harus Perhatikan Kepentingan Desa
- Delapan Permasalahan Pelaksanaan UU Desa
- Lima Titik Rawan Korupsi Dana Desa

**SENAT KHUSUS**

22



- DPD RI Gelar Silaturahmi Kebangsaan
- LaNyalla: Apakah Hak PKI Ikut Dipulihkan?
- Nono Sampono: Mereka Masih Ada di Indonesia!
- Try Sutrisno: Hak Apa Lagi yang Minta Dipulihkan?
- Mantan KSAD: Inpres yang Multi Tafsir
- Silaturahmi Kebangsaan Hasilkan 8 Rekomendasi

12 Pelanggaran HAM Dalam Inpres N0.2 Tahun 2023

**NUSANTARA**

33



- DPD RI Dorong Terwujudnya *Sister City* Indonesia-Jepang
- Sultan Ajak Korsel Majukan Pendidikan Vokasi Indonesia
- DPD RI HADIRI KONGRES EKOLOGI: Menjaga Hutan dengan Ekonomi Hijau Berkelanjutan
- Cangkang Sawit Indonesia Jadi Sumber Biomassa di Negeri Sakura
- Mengajak Pelaku Usaha Rusia Berinvestasi di Indonesia
- Ribuan Guru TK, Menggantungkan Harapan ke Wakil Daerah
- Senator Aceh Tolak Revisi Qanun LKS
- Alasan Keuangan Negara, Moratorium DOB Belum Dibuka
- Mafia Tanah Bikin Resah Daerah

**GALERI**

34



## VARIA SENAT

44

- Satu Jilid Lagi Antar Obligor BLBI ke Ranah Pidana
- Mengapresiasi Kinerja Kemenkeu
- Uji Sahih RUU DKI Jakarta: Menentukan Nasib Setelah IKN Pindah
- Raker PPUU-Menkumham Bahas RUU Inisiatif DPD RI
- Dimediasi BAP, Sengketa Lahan yang Masih Jadi Rebutan
- Tata Ruang di Daerah Masih Banyak Masalah
- Komite II DPD RI Lakukan Uji Sahih RUU Perikanan
- Komite IV Raker dengan BI Bahas Kebijakan Ekonomi Makro 2024
- RUU KSDAHE Dibahas Tripartit, DPD RI Sampaikan Usulan

## SUARA DAERAH

54

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Pinrang



## SEKRETARIAT JENDERAL

55



- *Digital Signage*, Mempermudah Akses Informasi Seputar DPD RI
- Kinerja Kearsipan Diganjar Penghargaan
- Dua Pejabat Setjen DPD RI Selesai Ikuti PKN II di LAN

## KAJIAN DAERAH

58

Kolaborasi Pemerintahan Daerah untuk Pencapaian SDGs Desa : Pengembangan Pariwisata Daerah

## GAGASAN

60



- Sah, Sistem Proporsional Terbuka dan Kemenangan Demokrasi Indonesia  
Oleh M. Syukur/Ketua Kelompok DPD RI di MPR

## WISATA

62

- Empat Destinasi Gorontalo yang Wajib Anda Kunjungi



## KULINER

63

- Empat Makanan Khas Bengkulu yang Renyah





**Sejak dikucurkan tahun 2015, dana desa kini mulai menjadi dilema. Dalam tempo tujuh tahun, telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa yang menjerat 973 pelaku. Separo (50%) di antara pelakunya adalah oknum kepala desa.**

Ilustrasi dana desa  
(Media Indonesia)





Dana desa untuk pertama kali dikucurkan pemerintah pada 2015, seiring terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara spesifik, UU tersebut juga mengatur terkait dana desa. Sedangkan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat.

Namun, dalam perjalanannya selama sembilan tahun ini, dana desa tersebut menjadi dilema. Dalam rentang waktu tujuh tahun sejak dana desa itu dikucurkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku. Sebanyak 50 persen pelakunya adalah kepala desa itu sendiri.

Angka kasus korupsi dana desa yang disebutkan KPK cukup tinggi. “Ratusan kepala desa yang tersangkut korupsi itu bukanlah angka yang kecil. Ini cukup memprihatinkan kita,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan baru-baru ini.

Permasalahan dana desa ini sudah menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) RI selama ini. Komite IV yang merupakan alat kelengkapan DPD RI dalam pengawasan dana desa tersebut, sudah sering berkunjung ke daerah dan menampung aspirasi kepala desa terkait pengelolaan dana desa.

Ketua Komite IV DPD RI Elviana menyebutkan, salah satu persoalan yang dikeluhkan kepala desa selama ini adalah terkait petunjuk teknis dalam pengelolaan dan cara pertanggungjawabannya yang tumpang tindih. Ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur pengelolaan dana desa dan juga ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT).

Selain peraturan dari kedua menteri itu, juga ada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Permenkeu itu dituangkan kewajiban postur anggaran dana desa, yaitu 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk pangan, 8 persen penanganan Covid-19 dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa.  
(\*)



Ketua Komite IV DPD RI Elviana  
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

# Berbagai Persoalan Melilit Pemerintah Desa



Ketua Komite I Andiarra Aprilia Hikmat menerima cendermata dari Wakil Bupati Kabupaten Gowa Abdul Rauf. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**B**erbagai persoalan telah melilit pemerintahan desa selama sembilan tahun ini, sejak diterapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik dari segi regulasi hingga pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Hal tersebut tercermin dari pertemuan Komite I DPD RI dengan para kepala desa se Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pertengahan Juni 2023 di Gowa. Komite I melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gowa untuk menyerap aspirasi terkait problematika yang terjadi dalam implementasi UU Desa selama sembilan tahun ini.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan kepala desa mencurahkan aspirasinya. Seperti kurangnya perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa dan PDTT terhadap desa-desa yang ada. Usulan-usulan desa kepada pemerintah seperti tak digubris.

Kemudian, ada pula yang mengeluhkan minimnya dana operasional kepala desa yang kurang lebih hanya 20 juta per tahun. Apalagi, gaji kepala desa juga masih jauh dari kata cukup, yaitu hanya sebesar Rp2,4 juta/bulan. Nominal tersebut dianggap tidak memadai. Inilah yang disinyalir salah satu penyebab terjadinya korupsi oleh kepala desa karena keterdesakan akan kebutuhan dana. Karena itu, DPD RI meminta agar pengaturan dana desa dapat ditata ulang untuk adanya penambahan alokasi penghasilan bagi kepala desa.

Keluhan lainnya yang muncul adalah rigiditas penggunaan dana desa. Akibat rigiditas ini, bahkan dana desa tidak dapat digunakan untuk merenovasi kantor desa sendiri. Untuk itu, diharapkan ada kebijakan pengelolaan dana desa, yaitu di samping mengacu kepada prioritas penggunaan, juga terdapat fleksibilitas dalam penggunaannya.



# Pak Kades Tak Perlu Takut!

Menanggapi keluhan kepala desa tersebut, Senator Ajbar mengatakan, kepala desa tidak perlu takut untuk menggunakan dana desa sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan dan disepakati dalam musyawarah desa. Sedangkan Senator Ajieq Padindang meminta agar desa jangan sampai terbuai dengan aneka penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.



**Senator Ajbar**  
(Foto: Opsi.ID)

Senator Maria Goreti menekankan, UU Desa sangat memiliki spirit ke-daerahan yang menjadi bidang utama DPD RI. Bahkan Maria menyebut UU Desa adalah anak kandung dari DPD RI. Senator Abdul Rahman Thaha menambahkan, Komite I rutin melakukan berbagai advokasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat desa.



**Senator Maria Goreti**  
(Foto: Kebaya.com)

Diakhir pertemuan, Senator Ajieq Padindang menggarisbawahi tentang dua masalah penting terkait dengan implementasi UU Desa yang mesti diselesaikan. *Pertama*, menyangkut pembagian urusan dan kewenangan desa yang jelas, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. *Kedua*, adanya regulasi ketat terutama terkait anggaran yang menyebabkan desa sulit untuk berkreasi. Hal ini mesti ditinjau kembali. (\*)



**Senator Ajieq Padindang**  
(Foto: Fajar.Com)

Sejumlah Kades di Sumsel diamankan aparat. (Foto: Viva)



## Ratusan Kades Terlibat Korupsi Dana Desa

**K**orupsi dana desa telah menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi dana desa ini masuk dalam tiga terbanyak kasus korupsi pengelolaan keuangan negara. Sepanjang tahun 2015-2022, sejak dana desa dikucurkan, KPK telah menyelidiki 851 kasus korupsi.

Dari 851 kasus korupsi dana desa tersebut, pelakunya sebanyak 973 orang dan 50 persen di antaranya adalah kepala desa (kades). Lainnya adalah perangkat desa, seperti bendahara. “Kades selaku pihak paling berwenang mengelola dana desa, sering memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri,” ungkap Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Aris Dedi Arham saat memberikan pembinaan kepada kepala desa se-Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di aula DPUPR Kabupaten Karanganyar, pertengahan Mei 2023.

Diungkapkan, modus yang digunakan pelaku korupsi dana desa itu seperti melakukan *mark up* anggaran, pemalsuan tanda tangan atau stempel, manipulasi belanja ke-

giatan dan sebagainya. Padahal, pemerintah telah memberikan aturan yang jelas tentang pemakaian dana desa. Penggunaannya wajib mengikuti aturan itu.

Bahkan KPK mengungkapkan, kasus korupsi dana desa ini termasuk kasus korupsi terbanyak dalam pengelolaan keuangan negara. Kepala Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Rino Haruno mengungkapkan, berdasarkan hasil survei menunjukkan korupsi dana desa merupakan tiga korupsi teratas dalam pengelolaan keuangan negara.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk dana desa yang jumlahnya cukup besar. Tidak kurang Rp468 triliun dana desa diberikan pemerintah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (\*)



# Kades di Aceh Dipaksa Ikut Bimtek Swasta

Anggota DPD RI H. Sudirman (dua dari kanan) saat bertemu salah seorang kepala desa di Aceh Tengah. (Foto Serambinews).



Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Sudirman menyoroti kepala desa (kades) di Aceh yang dipaksa mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan pihak swasta di Yogyakarta. Untuk mengikuti bimtek tersebut, kepala desa diminta kontribusi sebesar Rp25 juta yang dananya dikeluarkan dari dana desa.

Selaku anggota Komite IV DPD RI yang membidangi APBN, Sudirman mengaku telah lama menyoroti dan menyuarakan soal bimtek keluar daerah itu. Termasuk adanya pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam mendorong kepala desa di Aceh untuk mengikuti bimtek tersebut.

Dalam menangani kasus tersebut, Sudirman yang akrab disapa Haji Uma ini telah meminta Kapolda Aceh turun tangan melakukan penindakan hukum terhadap oknum dan instansi tertentu yang terlibat menekan kepala desa di Aceh terkait bimbingan teknis keluar daerah itu. Bahkan, Haji Uma juga meminta Pangdam dan Kajati Aceh un-

tuk dapat bersinergi mengawal dana desa dengan menindak tegas setiap oknum dari instansi masing-masing yang terlibat dalam hal pelaksanaan bimtek tersebut.

Terungkapnya kepala desa dipaksa untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan pihak swasta itu, adalah dengan beredarnya pernyataan salah satu kepala desa atau *reje* kampung di Aceh Tengah yang mengaku ditekan atau diancam oknum yang mengaku dari instansi tertentu dan meminta para kades harus ikut bimtek ke Yogyakarta.

Di Aceh Singkil, juga beredar kabar bahwa ada 116 desa akan mengikuti bimtek ke Yogyakarta dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 13 - 16 Juni 2023. Bimtek itu diduga atas rekomendasi sebuah lembaga diklat swasta pada 24 April 2023 lalu. Surat itu ditembuskan kepada Bupati Aceh Singkil, Kepala DPMK dan seluruh camat di wilayah Aceh Singkil. Bimtek itu konon tidak gratis. Setiap desa mengutus dua orang peserta dengan membayar biaya Rp 25 juta. (\*)





Ketua Komite IV DPD RI Elviana didampingi Wakil Ketua Sukiryanto dan Abdul Hakim saat memimpin rapat kerja dengan BPKP. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Realisasi Penyaluran Dana Desa Masih Rendah



Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih menemukan ada permasalahan hukum dalam pengelolaan dana desa. Temuan itu, selain berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, juga masih terdapat beberapa permasalahan administrasi bantuan langsung tunai (BLT) desa tahun anggaran yang sama.

Komite IV menilai, sejauh ini pemerintah daerah maupun desa masih menghadapi tantangan besar terkait pelaksanaan dana desa ini. Memasuki semester I tahun 2023, realisasi penyaluran dana desa secara nasional masih tergolong rendah, yakni Rp27,15 triliun atau sekitar 38,78 persen per 4 Juni 2023.

Kemudian, pemerintah desa masih belum bisa menggunakan dana desa sesuai kebutuhan dan kondisi desanya. Se jauh ini, masih adanya pengaturan tentang penggunaan dana desa untuk tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Mengingat masih terdapat regulasi yang tumpang tindih pada peraturan setingkat menteri yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, perlu adanya sinkronisasi peraturan dan simplifikasi tata kelola dana desa,” kata Ketua Komite IV DPD RI Elviana ketika memimpin rapat kerja bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), awal Juni 2023 di Gedung DPD RI di Jakarta.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengakui bahwa berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh lembaganya, penyaluran dana desa sampai akhir Mei 2023 masih rendah, yaitu 38 persen dari total alokasi dana desa. Rendahnya angka penyaluran tersebut dipicu oleh beberapa permasalahan, baik pada level kebijakan maupun implementasi di lapangan. (\*)



# ADA KADES Tak Inginkan Desanya Maju

**T**ernyata tidak semua kepala desa (kades) di daerah yang menginginkan status desa yang dipimpinnya naik kelas menjadi desa maju. Cukup banyak juga kades yang menginginkan desanya tetap berstatus sebagai desa berkembang. Alasan klasiknya, yaitu dengan status desa berkembang akan memudahkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya hal tersebut ditemukan di Provinsi Jawa Barat. Seperti diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari daerah pemilihan Jawa Barat Eni Sumarni saat rapat kerja



**Anggota DPD RI Eni Sumarni.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, awal Juni 2023.

“Ada beberapa kepala desa di Jabar justru berharap desanya tetap berstatus desa berkembang, bukannya desa maju. Hal tersebut dikarenakan ingin mempermudah sebuah desa mendapatkan bantuan. Kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius dari BPKP,” kata Eni Sumarni.

Beda lagi dengan yang disampaikan anggota DPD RI dari daerah pemilihan Maluku Utara Ikbal Hi Djabid. Dia meminta perwakilan BPKP di Provinsi Maluku Utara bisa memberikan pengarahan atau bimbingan kepada kepala desa terkait pertanggungjawaban dana desa yang menggunakan sistem *online*.



**Anggota DPD RI Ikbal Hi Djabid.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# DPD RI Prihatin Banyak Kades Terjerat Korupsi

**Anggota DPD RI Fernando Sinaga.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengungkapkan keprihatinannya berkaitan banyaknya kepala desa (kades) yang terjerat kasus korupsi dana desa. Untuk mencegah agar kasus serupa di masa mendatang tidak terjadi lagi, para senator itu meminta pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Fernando Sinaga mengaku sangat menyesalkan masih adanya kades yang melakukan korupsi dana desa. Terbaru di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperkuat pengawasan,” ungkap Sinaga.

Pengawasan terintegrasi harus segera diwujudkan dan diberikan payung hukum oleh pemerintah pusat, sehingga bisa menjadi pedoman bagi semua pihak di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa.

Sejak awal disadari bahwa dana desa sangatlah rentan dikorupsi. Maka dibutuhkan pengawasan terintegrasi, yaitu pengawasan bersama-sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai kewenangannya terkait *output* dan dampak dari setiap program yang didanai dana desa. “Pengawasan terintegrasi harus segera diwujudkan,” tegasnya.

Pengawasan terintegrasi ini juga harus mampu mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH). Selain itu, masyarakat desa juga sangat diharapkan perannya dalam pengawasan berbasis masyarakat, misalnya secara rutin meminta dokumen APBDes untuk memastikan apakah program dan penggunaan anggarannya sudah berjalan sesuai APBDes.

# Penggunaan Dana Desa Harus Transparan



**Anggota DPD RI Casytha A Kathmandu.**  
(Foto Wawasan)

Untuk mencegah dana desa dikorupsi oleh kepala desa atau perangkat desa, Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah Casytha A Kathmandu berpendapat bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan penguatan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ).

“Hal ini perlu dilakukan, selain mencegah kasus korupsi, juga realisasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Penguatan LPJ dana desa ini harus benar-benar dipegang, karena berkaitan dengan realisasi dan pertanggungjawaban anggaran. Yang mengawasi dana desa itu bukan hanya BPKP, ada juga LSM, wartawan dan lain-lain,” kata Casytha dalam Workshop Kolaborasi Pengawasan Desa di Pendopo Kantor Bupati

Grobogan, Jawa Tengah, akhir Mei 2023.

Terlepas adanya dana desa dikorupsi oleh kepala desa atau perangkat desa, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat Leonardy Harmainy menilai bahwa dana desa selama ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat di daerah. Karena itu, dia mengharapkan besaran dana desa dapat ditingkatkan.

Untuk mencegah dana desa itu dikorupsi, dia meminta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa itu diperketat. “Dana desa perlu ditingkatkan pengawasannya, mulai dari perencanaan, penatalaksanaannya, pelaksanaan, dan pengawasannya,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI tersebut dalam rapat kerja dengan BPKP awal Juni 2023. (\*)

**Anggota DPD RI Leonardy Harmainy.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# Senator Usulkan Dana Operasional Desa Dinaikkan

**M**ulai tahun 2023 ini, sebagian dana desa sudah boleh digunakan oleh kepala desa (kades) dan perangkatnya untuk biaya operasional. Pemerintah menetapkan anggaran operasional pemerintah desa tersebut sebesar tiga persen dari total dana desa yang diterima setiap desa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Hakim menilai, pagu dana operasional pemerintah desa dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dalam anggaran dana desa tersebut masih kecil. Karena itu, senator dari Lampung itu mengusulkan agar pagu dana operasional pemerintah desa dan siltap perangkat desa

dinaikkan.

“Dalam regulasi yang ada, dana operasional hanya membolehkan maksimal tiga persen dari dana desa. Angka ini sangat tidak memadai,” ujar Hakim dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Gedung DPD RI, awal Juni 2023.

Hakim menambahkan, perlu ada peta jalan dalam penyelesaian kendala yang dialami oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga ke depan diharapkan kinerja desa bisa lebih akuntabel, efektif, dan efisien dalam penggunaannya.

Penting juga peningkatan kualitas SDM perangkat desa. Faktanya, masih ada SDM di desa yang kualitasnya rendah. Abdul Hakim meminta kepada BPKP untuk terus bersama DPD RI dalam memberikan pendampingan kepada desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari dana desa. (\*)



**Anggota DPD RI Abdul Hakim.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# Revisi UU Desa Harus Perhatikan Kepentingan Desa



Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein saat memimpin RDPU dengan Direktur Eksekutif (IRE) Dina Mariana dan Rektor APMD Sutoro Eko Yunanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD R)

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang dana desa, telah berjalan selama sembilan tahun. Kini UU tersebut minta direvisi. Namun Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginginkan revisi UU Desa tersebut harus menghasilkan hal yang baik bagi kepentingan desa.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein berpandang-

an, penerapan UU tentang Desa selama sembilan tahun ini banyak membawa capaian dan kemajuan desa. Salah satunya adalah dengan dialokasikannya dana desa dari APBN sebagai stimulus bagi upaya memajukan dan mensejahterakan desa.

“Berbagai hal yang sudah dicapai tersebut hendaknya perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai desa maju, mandiri



Susana RDPU Komite I DPD RI dengan Direktur Eksekutif (IRE) Dina Mariana dan Rektor APMD Sutoro Eko Yunanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD R)

dan sejahtera sebagaimana yang menjadi amanat UU Desa,” kata Darmansyah ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Institute For Research Empowerment (IRE) dan Rektor Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Sutoro Eko Yunanto, awal Juni 2023.

Namun demikian, Darmansyah tidak memungkiri masih terdapat berbagai catatan kritis terhadap implementasi UU Desa tersebut. Catatan kritis itu diharapkan dapat memberikan arah yang benar dan tegak lurus dengan Undang-Undang Desa yang telah disusun dengan baik tersebut.

Rektor STPMD Sutoro Eko Yunanto menilai pelaksanaan UU Desa hingga saat ini hanya menyisakan prosedur formal. Di antara pasal masa jabatan kepala desa

yang dijalankan secara konsisten dan konsekuen sehingga banyak mereduksi spirit awal dari pembentukan UU Desa.

“Desa dan UU Desa adalah perkara besar, yang direduksi menjadi persoalan kecil berupa program dana desa, lalu ditekhnalisasi secara rumit menjadi proyek, uang, aturan, data, perangkat, aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi harus kembali ke semangat awal pembentukannya,” kata Sutoro.

Direktur Eksekutif IRE Dina Mariana melihat selama sembilan tahun implementasi UU Desa dirasakan belum optimal secara kelembagaan dalam menggerakkan sumber daya yang ada karena jebakan teknokrasi dan administrasi. Pemerintah desa sibuk menjadi pelayan supra desa maupun kepentingan pihak luar yang masuk ke desa. (\*)





Rombongan Komite I DPD RI yang turut didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dalam mengevaluasi 9 tahun pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

## Delapan Permasalahan Pelaksanaan UU Desa

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menemukan setidaknya ada delapan permasalahan dalam implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Temuan tersebut didapat dari hasil kunjungan kerja Komite I ke Sumatera Utara dalam rangka mengevaluasi sembilan tahun pelaksanaan UU Desa, pertengahan Juni 2023.

1. Perangkat desa masih kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai aparaturnya yang menjalankan tugas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Sehingga kreativitas dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kearifan lokal belum berjalan sebagaimana diharapkan.
2. Pengisian perangkat desa yang baru belum berdasarkan kompetensi dan prosedur yang ada.
3. Minimnya pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
4. Pemanfaatan potensi dan aset desa (BUMdesa) untuk peningkatan ekonomi masyarakat di desa masih belum optimal karena keterbatasan SDM pengelola BUMDesa.
5. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BPD dalam menjalankan tupoksinya, maka perlu diatur secara jelas pemberian honorariumnya.
6. Dukungan APBD kabupaten terhadap penetapan dan penegasan batas desa yang masih minim.
7. Keuangan desa yang bersumber dari dana desa, kebijakan dan regulasinya sering terlambat dan sering berubah sehingga tidak dapat cepat disikapi karena minimnya kapasitas pengelola.
8. Serapan dana desa yang masih rendah karena lambatnya pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran dana desa (ADD) dalam APBD, dan lambatnya penetapan Perdes tentang APBDesa karena kurang sejalannya kepala desa dengan BPS serta minimnya SDM pengelola keuangan desa yang sangat bergantung pada pendamping lokal. (\*)

# Lima Titik Rawan Korupsi Dana Desa

Daftar kasus penyalahgunaan dana desa terus memanjang. Di satu sisi, fakta ini membuat para kepala desa musti ekstra hati-hati menggunakan dana. Di sisi lain, para awak desa yang masih belum menguasai regulasi, ketar-ketir agar dirinya jangan sampai salah langkah tanpa sengaja.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melakukan pemantauan tentang praktik korupsi penggunaan dana pada tahun



Ilustrasi (berdesa.com)

2016-2017. Dari pemantauan itu, terdapat lima titik rawan korupsi dalam penggunaan dana desa.

## 1. Proses Perencanaan

Proses perencanaan penganggaran sangat mungkin disusupi kepentingan para elit desa. Karena lemahnya kontrol selama ini, banyak sekali penggunaan mata anggaran desa disusun berdasar kepentingan mereka mendapatkan keuntungan materiil dari sana seperti penentuan proyek yang ternyata dimunculkan hanya karena bakal jadi lahan garapan para elit ini.

## 2. Proses Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dana desa juga sangat rawan manipulasi data. Laporan ternyata hanya menyajikan angka-angka fiktif yang tak jelas pertanggungjawabannya.

Tokoh dan warga desa harus benar-benar mencermati model laporan pemerintah desa mereka. Soalnya seringkali warga lantas diam hanya karena sudah disodori angka tanpa mencoba menganalisa antara angka dengan realitas yang ada.

## 3. Proses Monitoring dan Evaluasi

Seringkali pelaksanaan monitoring hanya bersifat formalitas dan telat melakukan deteksi ketika ada fakta-fakta yang mengarah pada penyalahgunaan dana. Monitoring hanya menjadi acara formal dan menyajikan laporan baik-baik saja karena para pengawas malah berkomplot untuk mendapatkan keuntungan dari dana milik warga ini.

## 4. Proses Pelaksanaan

Nepotisme adalah salah satu pola yang biasanya terjadi di seluruh wilayah nusantara ini. Biasanya kepala desa atau perangkat akan berdalih 'terpaksa' melakukan itu karena tidak ada SDM yang dianggap mampu.

## 5. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Ada banyak proyek pengadaan barang dan jasa. Bukan rahasia lagi, salah satu sumber korupsi paling berbahaya di dunia. Model kejahatan paling kentara adalah *mark up* alias menaikkan harga barang sehingga negara sangat dirugikan.





# DPD RI Gelar Silaturahmi Kebangsaan



**D**ewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Silaturahmi Kebangsaan dengan tema “Menakar Konsekuensi Kenegaraan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat”, di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir Mei 2023.

Dalam acara tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan *opening speech* sebelum dilanjutkan oleh Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno sebagai *keynote speaker*. Try Sutrisno hadir secara virtual. Sedangkan narasumber yang dihadirkan langsung adalah Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, mantan KSAD Agustadi Sasongko Purnomo dan Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Kaelan.

Di antara undangan yang hadir dalam Silaturahmi Kebangsaan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Silaturahmi Kebangsaan itu melahirkan delapan rekomendasi. Salah satunya merekomendasikan kepada DPD RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan kajian dan telaah yang mendalam terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

Hadir dalam Silaturahmi Kebangsaan yang digelar DPD RI tersebut, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Jaksa Agung Sunarta, putri Pahlawan Revolusi Amelia Achmad Yani, Pimpinan DPD RI, Pimpinan Alat Kelengkapan serta Anggota DPD RI, Para Pejabat TNI dan Polri, para purnawirawan TNI-Polri dan para pemerhati kebangsaan dan konstitusi. (\*)

Suasana Silaturahmi Kebangsaan yang digelar DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





# LaNyalla: Apakah Hak PKI Ikut Dipulihkan?



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan *opening speech* pada pembukaan Silaturahmi Kebangsaan yang digelar DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mempertanyakan diktum pemulihan hak yang terdapat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Dalam diktum pertama huruf (a) pada inpres tersebut tertulis; memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana. Kemudian salah satu rekomendasi dari Komnas HAM yang harus diselesaikan adalah peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965.

Penegasan itu disampaikan LaNyalla ketika membuka Silaturahmi Kebangsaan bertema “Menakar Konsekuensi Kenegaraan Indonesia Terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat”, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir Mei 2023.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah bersepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara ini. “Saya pribadi menilai bahwa kita masih harus memperjuangkan agar Pancasila dapat kembali menjadi norma hukum tertinggi di dalam konstitusi kita yang telah kita tinggalkan akibat perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam,” paparnya.

LaNyalla mengajak semua elemen masyarakat untuk memperjuangkan Pancasila agar kembali kokoh sebagai *grondslag* dan *staatsfundamental norm* bangsa dan negara ini. Karena itu LaNyalla menawarkan gagasan untuk lahirnya Konsensus Nasional bangsa ini yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik sipil maupun militer untuk menyepakati bangsa ini harus kembali ke Pancasila, dengan mengembalikan konstruksi sistem bernegara yang dirancang para pendiri di masa lalu. (\*)

“

Ini penting untuk kita gali tentang seberapa luas makna kata memulihkan hak korban? Karena salah satu yang diperjuangkan PKI saat itu adalah menawarkan ideologi komunisme di Indonesia. Apakah itu juga termasuk dalam hak yang harus dipulihkan?

”

Ketua DPD RI  
AA LaNyalla  
Mahmud Mattalitti



(Ilustrasi: Ist)





# Nono Sampono: **MEREKA MASIH ADA DI INDONESIA!**



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam Silaturahmi Kebangsaan di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menyoroti 12 rekomendasi pelanggaran HAM Berat yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (TPP HAM). Utamanya terkait rekomendasi pertama berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965/1966.

“Dari 12 pelanggaran HAM berat yang disebutkan, saya ingin menyoroti nomor satu. Meski tak ditulis, tapi kita tahu maksudnya, itu kasus 1965/1966 atau G30S/PKI,” kata mantan Komandan Korps Marinir tersebut dalam acara Silaturahmi Kebangsaan bertema “Menakar Konsekuensi Kenegaraan Indonesia Terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat”, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa pekan keempat Mei 2023.

Menurut Nono, untuk 11 kasus pelanggaran HAM lainnya ia tak memperlmasalahkan. Namun yang menjadi persoalan adalah jika dinyatakan telah terjadi pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh negara dengan korban PKI pada tahun 1965/1966. Sejak didirikan tahun 1917, PKI telah tiga kali melakukan gerakan kudeta berdarah. Pertama tahun 1926, pemberontakan Madiun 1948 dan terakhir G30S/PKI tahun 1965/1966.

Meski sudah dilarang melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, namun Nono meyakini bahwa PKI masih ada sampai saat ini di Indonesia. “Jika ditanya apakah PKI masih ada saat ini? Menurut saya masih ada,” ujar Nono.

Nono menyebutkan beberapa ciri komunisme wajah baru yang harus diperhatikan dengan seksama. Di antaranya menempel pada kekuasaan, pandai membersihkan diri, menggunakan politik adu domba dan meminta kepada pihak lain meminta maaf dan mengganti rugi kepadanya. Ini masih terjadi sekarang. PKI telah bergerak mendorong pihak lain untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi melalui Inpres ini.

DPD RI akan terus mengawal agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berada pada jalur Pancasila dan UUD 45. DPD RI akan terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan konsensus nasional dengan cara kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli, kembali kepada sistem kenegaraan yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa dengan penyempurnaan untuk semakin memperkuat konstitusi asli Indonesia tersebut. (\*)



foto: Ist





# Try Sutrisno: HAK APA LAGI YANG MINTA DIPULIHKAN?



Wapres ke-6 RI Try Sutrisno sebagai *keynote speaker* dalam Silaturahmi Kebangsaan yang digelar DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Republik Indonesia Try Soetrisno menilai, munculnya polemik dengan terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat karena adanya predikat korban yang disematkan kepada pelaku dan pengikut PKI di dalam inpres tersebut.

“Sejarah mencatat, PKI telah melakukan upaya kudeta bersenjata dan berdarah. Hak apa yang minta dipulihkan? Apakah hak untuk memperjuangkan ideologi komunisme lagi? Atau hak untuk mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia? Bukankah hak anak cucu mereka sudah sama di mata hukum dan pemerintahan? Bahkan sudah ada anak cucu PKI yang menjadi pejabat dan anggota DPR. Lalu apa lagi yang dipulihkan?” Tanya Try Soetrisno.

Penegasan itu disampaikan Try Sutrisno sebagai *keynote speaker* dalam Silaturahmi Kebangsaan bertema “Menakar Konsekuensi Kene-garaan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat” di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa pekan keempat Mei 2023. Try Soetrisno hadir secara virtual.

Menurut Try Soetrisno, timbulnya berbagai polemik kebangsaan saat ini karena tidak adanya ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Saat ini kedaulatan mutlak di tangan partai politik dan presiden. Menjadi kewajiban bagi elemen bangsa ini yang masih memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan untuk mengembalikan Indonesia kepada sistem yang menjamin Pancasila bisa terlaksana.

“Saya sependapat dengan langkah DPD RI yang mengambil inisiatif mengajak seluruh elemen bangsa untuk melahirkan konsensus nasional demi perbaikan Indonesia, dengan cara kembali kepada Pancasila. Bila perlu kita sempurnakan dan kita perkuat sisi lemahnya dari sistem asli Indonesia tersebut,” ucap dia.

Try Soetrisno juga mengungkapkan kerisauannya dengan adanya survei terbaru menyatakan 83,3 persen siswa SMA menganggap Pancasila bukan ideologi permanen, sehingga bisa diganti.

Semua pihak harus waspada terhadap fakta hasil survey ini. Ini bukan main-main, karena para pelajar tersebut adalah generasi penerus. Apa jadinya Indonesia bila generasi mudanya tidak mengenal falsafah bangsanya sendiri. (\*)



# MANTAN KSAD: INPRES YANG MULTI TAFSIR

**M**antan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo menilai, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat multi tafsir. Karena peristiwa pelanggaran HAM Berat terjadi pada rentang waktu yang panjang, yaitu dari 1945 sampai 2020.

“Korban itu siapa, apakah dari PKI atau non PKI? Begitu juga dengan pelaku, apakah PKI atau non PKI?” Tanya Agustadi Sasongko dalam Silaturahmi Kebangsaan tersebut. Dalam proses pembahasan pelanggaran HAM berat, kata Agustadi, hendaknya mengkaji kembali secara adil dan seimbang, baik dalam penentuan pelaku maupun korban kedua belah



Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Kaelan.  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pihak, serta dalam penentuan pemulihan hak korban yang akan menerima santunan atau kompensasi.

Dalam proses pembahasan pelanggaran HAM berat, hendaknya melibatkan personel yang profesional dalam bidangnya seperti hukum, sejarah, forensik, saksi-saksi peristiwa dari kedua belah pihak dan para akademisi.

Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Kaelan mengatakan, sesungguhnya inpres itu luar biasa menyadarkan bagaimana situasi kebangsaan Indonesia. Satu hal dimensi yang harus dilihat bahwa fokus penyelesaian pada kasus yang terjadi tahun 1965/1966. “Dalam melihat masalah tersebut harus multidimensi. Tidak hanya pada tahun 1965 saja. Kelemahan yang terjadi dalam inpres itu ada pada titik pandang HAM,” ujar Kaelan.

Menurutnya, hal ini terjadi imbas bangsa ini tak lagi mengamalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Begitu juga dengan UUD 1945 yang telah empat kali mengalami amendemen pada tahun 1999-2002. Dari hasil penelitiannya, saat ini bukan lagi UUD 1945, tapi UUD 2002. (\*)



Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





# Silaturahmi Kebangsaan Hasilkan 8 Rekomendasi

**S**ilaturahmi Kebangsaan bertema “Menakar Konsekuensi Kenegaraan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat” yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhir Mei 2023, menghasilkan delapan rekomendasi.

**Pertama**, silaturahmi kebangsaan merupakan forum kesepakatan antara DPD RI dengan berbagai komponen bangsa, pengawal dan pengaman NKRI, Pancasila dan UUD 1945 untuk ditindak lanjuti sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing dalam rangka mengawal dan menjaga kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

**Kedua**, mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan konsensus nasional dengan cara kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli, kembali kepada sistem kenegaraan yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa. Di mana bila perlu disempurnakan dan diperkuat sisi lengahnya dari sistem asli Indonesia.

**Ketiga**, mengawal dan mengamankan kemurnian implementasi Pancasila, UUD NRI 1945 dan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Keempat**, memberikan masukan kepada pemerintah untuk tidak memberikan ruang bagi ideologi komunisme, apalagi hadirnya kembali PKI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Kelima**, mendorong pemerintah untuk berlaku adil terhadap para korban akibat tindakan yang dilakukan oleh Pemberontakan PKI sejak 1948 dan 1965. Bila diperlukan melakukan upaya hukum dalam rangka penyempurnaan Inpres No.2 Tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

**Keenam**, mendorong dan mendukung komponen bangsa khususnya TNI untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai alat negara yang tunduk kepada konstitusi dan UU dengan senantiasa menunjukkan jati dirinya sebagai prajurit pejuang yang profesional.

**Ketujuh**, dalam proses pembahasan pelanggaran HAM berat hendaknya mengkaji kembali secara adil dan seimbang, baik dalam penentuan pelaku maupun korban kedua belah pihak, serta dalam penentuan pemulihan hak korban yang akan menerima santunan/kompensasi.

**Kedelapan**, merekomendasikan kepada DPD RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna melakukan kajian dan telaah yang mendalam terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. (\*)

# 12 Pelanggaran HAM Dalam Inpres N0.2 Tahun 2023

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat yang diterbitkan pada 15 Maret 2023. Ada 12 pelanggaran HAM berat di dalam inpres tersebut.

## 1. Peristiwa 1965-1966

Sepanjang 1965–1966, sejumlah besar orang yang dituduh komunis mengalami penangkapan, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, hingga penghilangan paksa. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban.

## 2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985

Penembakan misterius atau Petrus yang terjadi sepanjang 1982-1985 mengakibatkan sejumlah besar orang yang dianggap preman ditembak secara misterius hingga meninggal dunia. Operasi ini dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menertibkan mereka yang dianggap liar. Namun, sering kali penentuan sasaran itu dilakukan dengan hanya melihat penampilan luar sang target.

## 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989

Peristiwa Talangsari menyebabkan 130 orang meninggal dan mengakibatkan terbakarnya 109 rumah hingga berbagai bentuk kekerasan lainnya dari aparat terhadap warga.

## 4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989

Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis merupakan peristiwa penyiksaan aparat ABRI terhadap warga Aceh selama masa konflik pada 1989–1998. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya terjadi di masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989–1998.

## 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998

Komas HAM mencatat 14 orang yang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa yang sampai dengan sekarang belum dapat diketahui nasibnya. Mereka adalah Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser.





## 6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Kejadian ini menelan korban 1.190 jiwa sepanjang 13-15 Mei 1998. Korban-korban tersebut termasuk 85 perempuan-khususnya etnis Tionghoa menjadi korban perkosaan secara berkelompok, dan ratusan gedung-gedung dirusak dan dibakar. Kasus ini terjadi di 88 lokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang, serta beberapa tempat di Bandung, Solo, Klaten, Boyolali, Surabaya, Medan, Deli, Simalungun, Palembang, Padang.

## 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999

Pada 12 Mei 1998, aparat melakukan penembakan terhadap empat orang mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Sementara itu, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

## 8. Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999

Peristiwa ini merupakan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap berprofesi menjadi dukun santet di Banyuwangi. Peristiwa ini berlangsung pada Februari-September 1998.

## 9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999

Pada 3 Mei 1999, terjadi sebuah konflik di Aceh yang disebut nama Tragedi Simpang KKA (Simpang Kraft) atau yang juga dikenal dengan nama Insiden Dewantara atau Tragedi Krueng Geukueh. Tragedi Simpang KKA yang terjadi di Kecamatan Dewantara, Aceh, tersebut bermula dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI.

## 10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002

Pada 13 Juni 2001, terduga aparat Korps Brigade Mobil melakukan penyerbuan kepada warga sipil di Desa Wondiboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan ini dipicu dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil di markas perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa oleh terduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka.

## 11. Peristiwa Wamena, Papua 2003

Tragedi ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 orang, korban luka 53 orang, bangunan milik masyarakat yang rusak dan terbakar sebanyak 530 unit, rusak 238 unit kendaraan dan 17 unit gedung milik pemerintah.

## 12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003

Peristiwa ini berawal saat Desa Jambo Keupok yang diduga menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka. Dalam operasinya, anggota TNI Para Komando bersama dengan Satuan Gabungan Intelijen melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil seperti penangkapan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan perampasan harta benda. (\*)

# DPD RI DORONG TERWUJUDNYA *SISTER CITY* INDONESIA-JEPANG



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota Nara, Jepang Nakagawa. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong segera terwujudnya kerja sama *sister city* atau *sister province* antara Indonesia dan Jepang. Salah satunya adalah antara Kota Nara, Jepang dengan Kota Solo, Jawa Tengah yang diwacanakan sejak 2012 lalu.

“Sekaranglah saatnya kita konkretkan wacana itu. Baik dengan Kota Solo maupun dengan kota-kota lainnya di Indonesia, misalnya Yogyakarta, Semarang, atau Surabaya ibukota provinsi Jawa Timur yang saya wakili sebagai Senator di DPD RI,” kata LaNyalla dalam pertemuan antara delegasi DPD RI dengan Wali Kota Nara, Jepang, Nakagawa ketika berkunjung ke Negara Sakura itu, akhir Mei 2023.

Selain LaNyalla, delegasi DPD RI yang melakukan kunjungan kerja ke Jepang itu adalah Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin serta 16 senator, yaitu Leonardy Harmainy, Eni Sumarni, Marthin Billa, Faisal Amri, Edwin Pratama Putra, Eva Susanti, Bustami Zainudin, Richard Hamonangan Pasaribu, Asep Hidayat, Tgh Ibnu Halil, Christiandy Sanjaya, Zakaria Bahasyim, Maya Rumantir, Tamsil Linrung, Novita Anakotta dan Filep Wamafma.

LaNyalla menyebutkan, selama ini hubungan Jepang-Indonesia hanya difokuskan pada kemitraan bisnis. Padahal hidup ini bukan hanya urusan bisnis. Kedua negara bisa membangun kemitraan di bidang pengembangan budaya de-

ngan menggunakan teknologi Jepang. Misalnya meningkatkan kualitas produk-produk budaya untuk mendukung industri pariwisata, termasuk kerajinan tangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Juga membangun situs-situs budaya untuk keperluan ilmiah sekaligus sebagai obyek wisata mancanegara.

Untuk bisa memperoleh gambaran seutuhnya tentang pengembangan kerjasama budaya dengan Indonesia, LaNyalla mempersilakan Wali Kota Nara berwisata ke daerah-daerah di Indonesia. “Kami sudah datang ke sini, sekarang giliran Pak Wali Kota berkeliling ke negeri kami. Para senator yang datang bersama saya ini akan dengan senang hati menyambut Pak Wali Kota di provinsinya masing-masing,” kata LaNyalla. (\*)





Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung usai FGD bertema "Siapakah Utusan Golongan MPR dan Bagaimana Pengisiannya?" di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Senin (12/6/2023). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Pimpinan dan Anggota Parlemen Qatar ketika berkunjung ke negara tersebut, akhir Mei 2023. Nono Sampono didampingi Duta Besar RI untuk Qatar YM. Ridwan Hasan dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Dida Gardera. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).



Ketua Komite IV Dewan DPD RI Elviana dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperlihatkan kesimpulan rapat kerja antara kedua institusi, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pertengahan Juni 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





Pimpinan Komite III DPD RI bersama Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) usai rapat kerja sebelum musim haji lalu di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama pimpinan dan anggota BKSP DPD RI di Wisma KBRI Phnom Penh, Kamboja ketika melakukan kunjungan kerja ke negara tersebut pekan kedua Juni 2023. Salah satu kegiatan mereka selama di Kamboja melakukan pertemuan dengan *Indonesian Chamber of Commerce (IndoCham)* dan *Indonesia - Cambodia Business Club (ICBC)*. (Foto Kemenlu)



Anggota DPD RI Angelius Wake Kako ikut panen jagung di Desa Gekeng Deran, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, belum lama ini. (Foto Kumparan)





# Sultan Ajak Korsel Majukan Pendidikan Vokasi Indonesia

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengajak pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi Korea Selatan untuk mengembangkan sistem pendidikan vokasi di Indonesia dengan pendekatan kolaborasi dan *partnership*.

Hal ini disampaikan saat berbicara di acara puncak “1ST Gumi Education Forum and ASEAN- Korea expert Future Forum”, Kyongwoon University, Korea Selatan pertengahan Juni 2023. Hadir Rektor Kyongwoon University Mr. Kim Dong-Je, PhD. para guru besar dan segenap unsur pemerintahan setempat, seperti Walikota Gumi atau Mayor of Gumi Mr Kim- Ho- Seob dan sejumlah pengusaha Korsel, serta delegasi ASEAN dan ASIA Tengah.

Selama ini, lanjut mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, Indonesia menjadi pasar potensial bagi industri otomotif hingga hiburan negeri ginseng Korea. Anak-anak muda Indonesia tumbuh dengan ketertarikan yang tinggi terhadap karya seni drama Korea pada skala yang luas.

Karena itu, Indonesia berharap Korea Selatan bisa



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Subbag Media Setjen DPD RI)

memperluas kurikulum vokasinya yang terkenal efektif menciptakan SDM yang unggul. Karena, secara SDM Indonesia akan melewati masa keemasannya atau bonus demografi hingga 2045.

Di salah satu Universitas ternama Korea Selatan tersebut, Sultan mengungkapkan bahwa lulusan sekolah vokasi Indonesia masih mendominasi pengangguran terbuka. Hampir sepuluh persen pengangguran terbuka Indonesia adalah lulusan sekolah menengah kejuruan. (\*)

“Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan kebutuhan dan kepentingan yang saling bertaut erat. Korea merupakan negara maju dengan pencapaian teknologi modern yang menjadi rujukan bagi banyak negara di dunia.”

Wakil Ketua DPD RI  
Sultan B Najamudin

## DPD RI HADIRI KONGRES EKOLOGI: Menjaga Hutan dengan Ekonomi Hijau Berkelanjutan



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan pidatonya di Kongres Ekologi Internasional Nevsky ke-10 di Saint Petersburg, Rusia. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menghadiri Kongres Ekologi Internasional Nevsky ke-10 di Saint Petersburg, Rusia, pada akhir Mei 2023. Kongres itu diselenggarakan oleh Pemerintah Rusia, Dewan Federasi, Majelis Antar-Parlemen Negara Anggota CIS, dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Ekologi Rusia bertema utama “*Ecology: a right, not a privilege.*”

Dalam kongres tersebut, Nono Sampono menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hutan dengan konsep pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan. “Indonesia bersama seluruh *stakeholder*, termasuk para *private sector* dan rakyat memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya membangun sebuah ekosistem berkelanjutan,” tegas Nono.

Harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup adalah pondasi dasar

konstitusi Indonesia. Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan ekonomi. Berbagai program aksi yang tengah dilakukan antara lain transformasi menuju pendekatan lanskap dalam pengelolaan sumberdaya hutan, promosi efisiensi energi, serta pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular.

Aspek lingkungan, kata Nono, telah menjadi perhatian besar dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), terlebih menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia sedang berupaya membangun lingkungan kehutanan dengan memandang setiap kebijakan dan regulasi sebagai pengejawantahan dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Turut mendampingi Nono Sampono dalam kongres tersebut sejumlah anggota DPD RI: Ahmad Nawardi, Matheus Stefi Pasimanjeku, Angelius Wake Kako dan Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, serta Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup Kristanto. (\*)





# CANGKANG SAWIT INDONESIA Jadi Sumber Biomassa di Negeri Sakura

Cangkang sawit. (Foto Antara)

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk memperbaharui rumus penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini. Alasannya, saat tingginya permintaan dan nilai ekonomis cangkang sawit Indonesia di Jepang.

Salah satu peluang investasi di sektor industri pengolahan cangkang sawit adalah produksi *pellet (high-energy density biomass)* yang potensial meningkatkan nilai kalori cangkang sawit menjadi setara dengan batu bara antrasit (6.100- 6.400 kkal per kg). Di Indonesia, potensi produksi cangkang sawit mencapai 11 juta ton per tahun, tetapi masih diekspor sekitar 3,5 juta ton per tahun dalam bentuk komoditas setengah jadi.

Namun, dari penetapan harga TBS selama ini, belum memasukkan cangkang sawit sebagai salah satu faktor yang bernilai ekonomi. Harga TBS ditentukan dengan rumus: harga minyak x *rendemen* minyak + harga kernel x *rendemen* kernel x faktor pajak. Karena itu, Sultan mendorong Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait untuk memberikan perhatian khusus pada produk cangkang sawit

“

Agenda transisi energi Jepang membutuhkan suplai sumber energi biomassa utama seperti cangkang sawit dari Indonesia. Artinya, cangkang sawit bisa diklasifikasi sebagai produk olahan sawit yang bernilai ekonomi tinggi. Sehingga penting untuk diperhatikan sebagai variabel utama dalam proses penentuan harga TBS sawit oleh pemerintah.

”

Wakil Ketua DPD RI  
Sultan B Najamudin

yang selama ini teridentifikasi sebagai limbah industri pengolahan sawit. Sehingga petani sawit bisa mendapatkan sedikit tambahan nilai TBS yang mengalami koreksi saat ini.

“Saat ini harga TBS sawit di hampir semua daerah mengalami penurunan yang signifikan akibat penurunan ekspor CPO. Disaat yang sama, Eropa yang merupakan pasar potensial produk perkebunan, khususnya sawit Indonesia, kini sedang menutup pintu bagi produk Sawit Indonesia,” katanya. (\*)

# Mengajak Pelaku Usaha Rusia Berinvestasi di Indonesia



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi sejumlah senator menerima cenderamata dari Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Federasi Rusia Sergey Sergeyeveck Nosov. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Indonesia dan Rusia sepakat untuk terus menjalin komunikasi serta melakukan langkah-langkah strategis agar bisa meningkatkan investasi di masa mendatang. Hal itu tercantum dalam pertemuan delegasi DPD RI dengan Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Federasi Rusia Sergey Sergeyeveck Nosov, di Moscow, akhir Mei 2023.

Pertemuan tersebut juga bersepakat untuk terus berkoordinasi erat, melakukan dialog secara regular, serta mendorong penguatan interaksi kalangan pelaku usaha kedua negara, baik melalui partisipasi dalam berbagai forum dan pameran dagang, maupun investasi dan industri yang diselenggarakan kedua negara.

Delegasi DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono juga mengajak pelaku usaha Rusia untuk bekerja sama dan berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang energi, seperti pembangunan kilang minyak dan gas (migas) di Tuban dan pembangunan Blok Natuna.

Nono Sampono menyampaikan Indonesia telah melakukan perbaikan perekonomian nasional dan iklim investasi melalui kemudahan pengurusan izin berusaha dan berinvestasi melalui penyempurnaan *online single submission* (OSS). Kemudian juga memberikan sejumlah insentif fiskal, dan revisi sejumlah regulasi terkait UU Cipta Kerja.

Federasi Rusia menyatakan ketertarikan melakukan kerja sama dengan Indonesia, khususnya di bidang industri dan infrastruktur, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan sistem *floating* yang dapat bergerak kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan listrik di area pulau/pantai dengan kapasitas 100-150 Mega Watt.

Rusia juga tertarik melakukan kerja sama dalam bidang antariksa, peluncuran satelit Indonesia. Satelit diharapkan dapat mendukung kebutuhan komunikasi, transportasi darat-laut-udara, pertanian, perikanan, serta mitigasi bencana dan kebakaran hutan. (\*)





# Ribuan Guru TK, Menggantungkan Harapan ke Wakil Daerah



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi sejumlah senator bersama guru-guru TK se Indonesia pada acara HUT ke-73 IGTKI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ribuan guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), menggantungkan harapannya ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat ini, ada 261.735 guru TK di seluruh Indonesia, 92 persen di antara mereka berstatus honorer atau non-ASN. Honor yang mereka terima pun jauh dari upah minimum di suatu daerah, rata-rata hanya Rp500 ribu per bulan.

Mereka berharap bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan mereka meminta tambahan kuota untuk guru honorer TK diangkat menjadi PPPK. Setelah diangkat menjadi PPPK, mereka berharap tetap ditempatkan

di TK mereka mengajar.

Harapan dan aspirasi itu disampaikan Ketua Umum PP IGTKI Nur Sriyati kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-73 IGTKI, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, awal Juni 2023. “Kami mohon kesejahteraan kami diperhatikan dan diperjuangkan,” kata Nur kepada LaNyalla didampingi sejumlah senator.

Harapan yang sama juga disampaikan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidin. Dia berharap kepada LaNyalla sebagai pemimpin lembaga tinggi negara dapat mendorong suatu kebijakan agar kesejahteraan dan status pekerjaan para guru TK ditingkatkan. “Tolong diperhatikan nasib para guru

TK Pak LaNyalla. Kami percaya Pak LaNyalla dapat merasakan suasana kebatinan kami dan dapat memperjuangkan aspirasi para guru TK,” harap Unifah.

Menanggapi hal itu, LaNyalla mengaku sudah mengetahui, mendengar dan melihat langsung kondisi guru TK di berbagai daerah di Indonesia. “Saya sudah berkeliling Indonesia. Saya sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Saya menangkap aspirasi dari *stakeholder* di berbagai daerah, salah satunya dari kalangan guru. DPD RI berusaha senantiasa berpihak kepada kepentingan para guru. Kami sudah membentuk Pansus Guru Honorer di tahun 2022 yang lalu,” kata LaNyalla. (\*)

# Senator Aceh Tolak Revisi Qanun LKS



**Anggota DPD RI H Sudirman.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Anggota DPD RI HM Fadhil Rahmi.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dua senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Aceh HM Fadhil Rahmi dan H Sudirman menolak rencana Pemerintah Provinsi Aceh yang mengembalikan bank syariah ke bank konvensional dengan merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Bahkan, HM Fadhil Rahmi menilai pemikiran Pemerintah Aceh itu suatu hal yang keliru dan salah. Karena Qanun LKS adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan kekhususan dan keistimewaan Aceh, terutama pada pasal 125, 126 dan 127. Sedangkan Qanun LKS adalah tingkatan kedua dalam penyempurnaan syariat Islam di Aceh setelah busana, yaitu bidang muamalah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sempat *error* awal

“Cara berpikir seperti ini, *error*. Mengembalikan bank konvensional berarti mengabaikan Qanun LKS yang secara otomatis tidak mengindahkan kewenangan Aceh dalam UUPA, terutama pasal 125, 126 dan 127. Harusnya Pemerintah Aceh jeli melihat masalah yang terjadi.”

**Anggota DPD RI  
HM. Fadhil Rahmi**

Mei 2023, tidak bisa dijadikan alasan karena di Aceh banyak bank syariah, seperti Bank Aceh Syariah, BTN Syariah serta sejumlah bank syariah lainnya. Selain itu, Pemerintah Aceh juga bisa mengundang bank konvensional kembali beroperasi di Aceh. Bank Mandiri, BNI dan BRI juga

bisa beroperasi di Aceh, tidak ada yang melarang, asalkan membuka cabang syariahnya.

“Jadi perkara *error* BSI hanya dijadikan alasan agar Qanun LKS direvisi, jelas ada misi terselubung. Pemikiran seperti ini jelas-jelas *error*. Ini seperti menjilat ludah sendiri. Saya mohon doa dari seluruh rakyat Aceh agar membuka pintu hidayah dan mengetuk hati para pemimpin Aceh atas kealpaan ini,” ujar Fadhil.

Senator H Sudirman alias Haji Uma menilai, serangan *cyber* yang membuat sistem BSI *down* jangan dijadikan alasan mendegradasi Qanun LKS di Aceh. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 LKS Aceh adalah wujud nyata kekhususan Aceh. Secara moral, semua rakyat Aceh bertanggung jawab mempertahankan. Bukan sebaliknya, malah mendegradasi kekhususan yang telah diperoleh dengan susah payah. (\*)





Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, awal Juni 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

## Alasan Keuangan Negara, Moratorium DOB Belum Dibuka

**K**inginan sejumlah daerah yang menghendaki pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tidak bakal terealisasi dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini masih belum akan mencabut moratorium DOB tersebut. Salah satu alasan perimbangannya adalah terkait kondisi keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Otonomi Daerah, di Kantor Wakil Presiden, awal Juni 2023. "Saya sudah menyampaikan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Otonomi Daerah tentang perlunya dibuka kembali pembentukan daerah otonomi baru," jelas Nono usai bertemu Wapres.

Namun, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah masih memberlakukan moratorium

DOB tersebut. Alasannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Meski demikian, sedikit ada celah karena memungkinkan ada beberapa DOB yang secara selektif terpilih melalui kajian yang mendalam dan komprehensif.

"Dalam keadaan moratorium DOB, pemerintah memberikan kesempatan Papua untuk bertambah menjadi empat provinsi. Karena itu, saya juga berharap ada perhatian perlunya pemekaran wilayah baru di wilayah-wilayah perbatasan," kata senator dari daerah pemilihan Maluku itu.

Nono menjelaskan, terdapat 173 DOB (13 DOB dari Maluku) yang diusulkan oleh DPD RI pada periode lalu. Untuk menentukan daerah yang dapat menjadi wilayah baru, tambah dia, maka perlu dilakukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek. "DPD RI, Komisi II DPR dan Kemendagri akan membahas bersama. Ada 173 DOB, tetapi tentu kita akan melihat mana yang sangat prioritas," jelas Nono Sampono. (\*)



## Mafia Tanah Bikin Resah Daerah

Anggota DPD RI Abraham Liyanto bersama Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terus memberantas mafia tanah di dapilnya itu. Pemberantasan tidak selesai dengan penangkapan beberapa orang mafia tanah di Labuan Bajo, pada tahun 2021 lalu.

Ia mengapresiasi penindakan mafia tanah di Labuan Bajo tahun 2021 lalu yang berhasil menetapkan 17 orang tersangka. Termasuk mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.

“Mafia tanah di NTT sangat banyak dan menggurita. Karena itu saya meminta Menteri ART/Kepala BPN harus melanjutkan bersih-bersih,” kata Abraham di Jakarta, pertengahan Juni 2023.

Saat itu, ada sejumlah orang yang ditangkap karena terlibat mafia tanah. Termasuk beberapa pejabat dari Badan Pertanahan DKI Ja-

karta. Abraham berharap aksi ‘bersih-bersih’ dari Hadi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi harus sampai ke daerah. Aksi bersih-bersih di NTT juga tidak selesai hanya di Labuan Bajo, tetapi juga di tempat lain. “Saya minta seluruh NTT. Praktik mafia tanah di NTT sudah sangat menjengkelkan,” tegas Abraham.

Pihak-pihak yang diduga terlibat mafia, mulai dari oknum tua adat atau pemilik tanah ulayat. Mereka bekerja sama dengan oknum pengacara untuk menggugat tanah yang punya sertifikat. Kerja sama itu melibatkan oknum pengurus RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah daerah. Oknum Badan Pertanahan diduga juga masuk dalam lingkaran mafia tersebut.

“Di pengadilan, mereka ditengarai punya jaringan, mulai pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Begitu ada gugatan, mereka pasti menang karena sudah ada jaringan di dalam,” jelas senator yang sudah tiga periode ini. (\*)





# Satu Jilid Lagi Antar Obligor BLBI ke Ranah Pidana

Ketua Pansus BLBI DPD RI Jilid II Bustama Zainudin didampingi wakil ketua Tamsil Linrung dan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim saat memberikan keterangan pers. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid II. Pansus ini diketuai Senator Bustami Zainudin dengan wakil ketua Senator Tamsil Linrung dan Senator Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim.

Pansus BLBI Jilid II ini bertugas menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus BLBI Jilid I, terutama terkait butir ke-6 dari sembilan rekomendasi yang ada.

Pansus BLBI Jilid II ini bertugas sejak Mei 2023 dengan memiliki target membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. "Target kami mempidanakan para obligor ini. Uang pajak

rakyat ini harus diselamatkan. Apalagi mereka sudah 25 tahun mendapat kemurahan dari negara," tegas Bustami Zainudin kepada wartawan, pertengahan Juni 2023.

Pansus BLBI Jilid I telah menemukan sejumlah kerugian negara terkait pengucuran dana talangan BLBI tahun 1997-1998 dan juga pemberian obligasi rekap. Dana talangan BLBI untuk membantu bank-bank memenuhi penarikan dana masyarakat diakui Satgas BLBI telah merugikan negara sebesar Rp110 triliun.

Ada kewajiban negara untuk membayar bunga obligasi rekap (OR) BLBI setiap tahun sebesar Rp60 triliun. Menurut BPK, APBN masih menge-

luarkan pembayaran bunga OR BLBI senilai Rp47,78 triliun per September 2022. "Audit BPK ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Maka target Pansus BLBI Jilid 2 ini adalah tindak pidana korupsinya diurus sampai pengadilan pidana biar terang benderang di depan rakyat semua," kata Bustami.

Wakil Ketua Pansus BLBI Jilid II Tamsil Linrung mengatakan, belakangan ini di media sedang ramai memberitakan mengenai saling bantah utang piutang terkait BLBI antara Kementerian Keuangan, Satgas BLBI, dan seorang pengusaha bernama Jusuf Hamka. Hal itu menunjukkan masih ada yang belum terang mengenai pengucuran BLBI maupun pemberian obligasi rekap BLBI. (\*)

# Mengapresiasi Kinerja Kemenkeu

**K**etua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Elviana, mengapresiasi capaian-capaian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid, serta mampu mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di tengah-tengah berbagai permasalahan dihadapi, seperti pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik.

DPD RI melalui Komite IV juga berterima kasih kepada Kementerian Keuangan beserta jajaran atas penyelesaian Laporan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Apresiasi itu disampaikan Elviana saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pertengahan Juni 2023.

Sebelumnya, Menkeu menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi yang dalam secara global. Indonesia dan India termasuk pulih paling cepat, walaupun dihadapkan pada krisis geopolitik. “Dengan kondisi ekonomi yang selalu dihadapkan pada guncangan, maka APBN merupakan instrumen untuk menahan guncangan tersebut. Dengan demikian Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan defisit yang relatif kecil pada tahun lalu, yakni



Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komite IV DPD RI Elviana menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

2,64 persen,” kata Sri Mulyani.

Meski memberikan apresiasi, sejumlah anggota Komite IV menyampaikan persoalan yang terjadi di daerah pemilihannya masing-masing. Seperti disampaikan Amirul Tamim, senator dari Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara cukup tinggi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH).

Sudirman, senator dari Provinsi Aceh menyampaikan terkait realisasi dana desa. BLT masih ada, tapi kurang efektif. Dia menyebut BLT menjadi bancakan dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Karena itu, dia menyarankan lebih baik masyarakat diberi bantuan kegiatan produktif sehingga nantinya masyarakat tidak tergantung pada pemerintah.

Ikbal Hi Djabid senator dari Maluku Utara menyampaikan bahwa DBH seharusnya mendapat perhatian khusus. Karena Maluku Utara adalah daerah penghasil tambang, tapi kesejahteraan masyarakatnya belum terangkat. Seharusnya DBH bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia berharap agar pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan di Maluku Utara dengan meningkatkan anggaran daerah.

Anggota DPD RI dari Papua Barat Sanusi Rahaningmas menyampaikan keluhan dari aparat sipil negara (ASN) di Papua Barat terkait biaya perjalanan dinas. “Banyak ASN yang mengeluh di Papua Barat terkait perjalanan dinas yang tak memadai menghadapi kondisi daerah di Papua Barat yang berbeda dengan daerah lain,” katanya. (\*)





Komite I DPD RI yang dipimpin Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim bersama narasumber dalam kegiatan uji sah RUU tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, di Kampus FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

## Uji Sah RUU DKI Jakarta: Menentukan Nasib Setelah IKN Pindah



Komite I DPD RI yang dipimpin Darmansyah Husein bersama narasumber dalam kegiatan uji sah RUU tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, di Kampus Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran Bandung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



“ Status Jakarta sebagai IKN akan hilang namun tetap sebagai daerah otonom yang mengatur kewenangan kekhususan. ”

Wakil Ketua Komite I DPD RI  
Pangeran Syarif Abdurrahman  
Bahasyim

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pasca dipindahkannya Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang IKN.

Terkait dengan itu, Komite I DPD RI sedang gencar melakukan uji sah terhadap RUU tersebut dalam bentuk seminar. Seperti yang dilakukan Komite I DPD RI di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, dan di Kampus Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat pada akhir Mei 2023.

Dari Kampus FISIP Unpad, Bandung, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darman-

syah Husein mengatakan, walaupun nantinya Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, akan tetapi Jakarta sebagai episentrum dan barometer nasional tidak dapat terbantahkan. Karena itu, RUU itu nanti diharapkan mampu menjawab tantangan mengenai kekhususan yang akan dilabelkan ke Jakarta.

Di kedua kampus tersebut, tampil sebagai pembicara sejumlah akademisi masing-masing kampus dan pakar. Di FEB UI, tampil sebagai pembicara Dekan FEB UI Teguh Dartanto dan pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan. Sedangkan di FISIP Unpad tampil sebagai narasumber Ketua Program Pascasarjana FISIP Unpad Mudiwati Rahmatunnisa, dan KK Perencanaan dan Perancangan Kota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Sugiantoro. (\*)





Ketua PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batubara didampingi Wakil Ketua PPUU M Afnan Hadikusumo dan Aji Mirni Mawarni (kiri atas) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia (foto kanan bawah). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# RAKER

## PPUU-Menkumham Bahas RUU Inisiatif DPD RI

**P**anitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedua belah pihak membahas Prolegnas RUU yang menjadi inisiatif DPD RI dan revisi RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Dalam rapat kerja yang berlangsung akhir Mei 2023 tersebut, PPUU DPD RI menilai adanya ketidaksesuaian antara UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terutama terkait fungsi *sea and coast guard*.

“PPUU melihat terdapat disharmoni fungsi *sea and coast guard*, sehingga dipandang perlu adanya revisi di beberapa pasal dalam UU Kelautan untuk memperkuat Bakamla RI. Kita juga berharap agar RUU ini yang merupakan inisiatif PPUU DPD RI dapat segera menjadi UU,” kata Ketua

PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batubara didampingi Wakil Ketua PPUU M. Afnan Hadikusumo dan Aji Mirni Mawarni.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendukung agar RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2024. Menurutnya, penyusunan Prolegnas adalah untuk menentukan skala prioritas program pembentukan UU dalam mewujudkan sistem hukum nasional. “Prolegnas diharapkan berfungsi sebagai penyaring dan pengendali, dan pada prinsipnya pemerintah mendukung ketiga RUU usulan DPD RI untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2024,” ujar Yasonna.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia berharap agar dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2014 dapat ditambahkan substansi terkait penetapan Bakamla sebagai Indonesia *Cost Guard*, penajaman tugas dan fungsi kewenangan Bakamla, juga kewenangan penyidikan, sarana prasarana, hingga kedudukan Kepala Bakamla RI. (\*)



**B**adan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan mediasi sengketa lahan antara Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia (APRTNI) dan pensiunan PNS Kementerian Perhubungan (eks karyawan PJKA) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kedua pihak dipertemukan dalam rapat dengar pendapat umum di ruang Majapahit, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir Mei 2023.

Ketua BAP DPD RI Aji Padindang saat memimpin pertemuan itu menegaskan, BAP dengan kewenangannya yang terbatas bukanlah lembaga negara penyelesai masalah, namun yang dapat dilakukan adalah memediasi pihak terkait untuk mendapatkan solusi terbaik.

Permasalahan atau sengketa antara APRTNI dengan PT KAI tersebut telah berlangsung lama, sejak tahun 2007 dan belum menemukan titik terang sampai saat ini. BAP DPD RI akan terus mendorong penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan antara APRTNI dan pensiunan PNS Kementerian Perhubungan RI dengan PT KAI.

“Permasalahan tersebut perlu mendapatkan solusi terbaik untuk kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena itu,

dibutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menuntaskan konflik dan sengketa pertanahan agar lebih berkeadilan dan reforma agraria menjadi salah satu gantungan harapan untuk penyelesaian yang adil dan tuntas,” tegas Padindang.

Anggota DPD RI Ahmad Sukisman mengatakan, masyarakat telah menempati rumah atau lahan tersebut selama bertahun-tahun sehingga perlu mendapatkan perlindungan sebagai warga negara, yaitu diberikan ganti untung atau dilakukan relokasi ke tempat yang layak demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Sementara, anggota DPD RI Sanusi Rahaningmas berpendapat bahwa masyarakat berhak mendapatkan keadilan. Ia menilai masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI Sandry Pasambuna menyatakan, perusahaan BUMN ini dituntut untuk melakukan penyelamatan dan optimalisasi aset, termasuk tanah dan bangunan milik PT KAI. Salah satunya adalah lahan yang ditempati oleh masyarakat APRTNI dan pensiunan PNS Kementerian Perhubungan RI (PJKA). “Sebagai *win-win solution*, PT KAI menawarkan solusi persewaan dengan penghuni rumah,” jelasnya. (\*)





# Tata Ruang di Daerah Masih Banyak Masalah



Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto usai menggelar rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang membawa perbaikan signifikan bagi penyelesaian persoalan penataan ruang di daerah. Karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta menciptakan penataan tata ruang daerah yang dapat melindungi masyarakat.

Saat mengadakan rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, awal Juni 2023, Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat menegaskan, tidak jarang penataan ruang bertabrakan dengan hak

masyarakat adat, menimbulkan sengketa dan konflik lahan, serta proses pendaftaran tanah tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto pun mempertanyakan komitmen dan upaya dari Kementerian ATR/BPN dalam membangun dan melaksanakan pengaturan tata ruang di daerah. Di daerah banyak terjadi permasalahan di masyarakat yang melibatkan mafia tanah dan oknum pegawai ATR/BPN.

Senator dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani mengungkapkan, selain permasalahan mafia tanah yang masih banyak terjadi di Sumatera Selatan, juga banyak wilayah di provinsi daerah

pemilihannya itu yang belum memiliki tata ruang yang ideal. Salah satunya terkait alih fungsi ruang terbuka hijau yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa kementerian dan lembaga yang dipimpinnya terus mendorong proses percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Khusus RDTR kabupaten dan kota ditargetkan pemenuhan sekitar 2.000. "Untuk dapat mewujudkan penataan ruang yang ideal, dibutuhkan adanya sinergi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata sang menteri. (\*)

# Komite II DPD RI Lakukan Uji Sahih RUU Perikanan

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan uji sah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perikanan di tiga perguruan tinggi, yaitu di Universitas Udayana (Unud) Bali, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, dan IPB University Bogor, awal Juni 2023.



Ketua Komite II Yorrys Raweyai didampingi Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin menyerahkan cenderamata kepada Rektor IPB University Arif Satria. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Di IPB University, rombongan Komite II langsung dipimpin oleh Ketua Komite II Yorrys Raweyai. Di Udayana, dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen dan di Untirta dipimpin Wakil Komite II DPD RI Abdullah Puteh. Tampil sebagai narasumber dalam uji sah RUU tersebut adalah pimpinan di masing-masing ketiga perguruan tinggi.

Pelaksanaan uji sah ini bertujuan untuk menguji sejauh mana substansi dan materi RUU Perikanan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Menguji sejauh mana substansi dan materi RUU Perikanan dapat diterima oleh masyarakat, dan menyempurnakan draf naskah akademik dan draf RUU yang telah disusun.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin yang ikut hadir di IPB Bogor mengatakan, RUU Perikanan ini diharapkan dapat memwadahi potensi perikanan yang sangat besar, tidak hanya dari perikanan konsumsi saja tetapi juga perikanan non-konsumsi seperti ikan hias, mutiara dan lain-lain.

Sementara Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan harapan besar terhadap RUU tersebut. "RUU Perikanan tak boleh hanya memikirkan aspek *sains* dan ekologi saja, tetapi juga harus mencakup aspek sosial ekonomi," katanya. (\*)



Rombongan Komite II DPD RI yang ikut melakukan uji sah RUU Perikanan di Udayana, Denpasar, Bali. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Rombongan Komite II DPD RI yang ikut melakukan uji sah RUU Perikanan di Untirta, Banten. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





## Komite IV Raker dengan BI Bahas Kebijakan Ekonomi Makro 2024



Disaksikan pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI, Deputy Senior Gubernur BI Destry Damayanti menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Tahun 2024, Indonesia diperkirakan masih menghadapi tantangan eksternal yang cukup besar, ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode pra-pandemi. Adapun suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Ketua Komite IV DPD RI Elviana dalam rapat kerja bersama Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membahas kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024 di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pertengahan Juni 2023, konsekuensi dari laju inflasi tersebut mengakibatkan kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi.

Senator Amirul Tamim mempertanyakan stabilitas ekonomi nasional di tahun 2024 mengingat tahun depan masih merupakan tahun politik. Pada kesempatan itu, Amirul juga mempertanyakan rencana *redenominasi* BI yang sudah lama tidak direalisasikan.

“Stabilitas ekonomi yang digambarkan BI membaik dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin stabilitas tersebut masih dapat terjaga di tahun 2024, mengingat tahun depan merupakan puncak tahun politik. Kami juga berharap BI dengan dukungan Presiden RI agar mempertimbangkan pelaksanaan rencana penyederhanaan nilai mata uang rupiah agar perekonomian menjadi lebih efisien,” ucap Amirul.

Deputy Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebutkan bahwa dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat karena didukung oleh positifnya kinerja ekspor dan permintaan dalam negeri. Kinerja ekspor pada April 2023 juga kuat di tengah membaiknya perekonomian global. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi 2023 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,5-5,3% dan akan meningkat pada 2024 menjadi 4,7-5,5%.

Terkait laju inflasi global, Destry mengatakan, nilai tukar rupiah menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan berada dalam kisaran Rp14.800-Rp15.200 per dolar AS pada 2023, dan bergerak di kisaran Rp14.600-Rp15.100 per dolar AS pada 2024. (\*)

## RUU KSDAHE Dibahas Tripartit, DPD RI Sampaikan Usulan

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin dalam rapat tripartit itu membahas RUU KSDAHE di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).



**K**omite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) secara tripartit bersama Komisi IV DPR RI dan Pemerintah. RUU ini sebelumnya telah masuk ke dalam substansi pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Dalam rapat tripartit di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pertengahan Juni 2023, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menilai pentingnya pengaturan tentang konservasi sumber daya alam hayati sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas kelestarian alam Indonesia, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Senator dari Lampung ini juga menyampaikan beberapa hal pokok dari pandangan dan pendapat DPD RI terkait RUU KSDAHE. Seperti pengertian konservasi SDA hayati pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, seharusnya diakomodir di dalam batang tubuh. Oleh karena itu, DPD RI mengusulkan penambahan Pasal 5A.

Penambahan Pasal 5A berbunyi: konservasi sumber daya alam hayati dilakukan melalui

kegiatan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan SDA hayati, dan pemanfaatan secara lestari SDA hayati.

Kemudian pengertian mengenai sistem penyangga kehidupan sangat fundamental. Sistem penyangga kehidupan harus mencakup seluruh elemen terutama manusia, sehingga tidak hanya pada kawasan konservasi saja. Dalam strategi konservasi dunia, sistem penyangga kehidupan dimaknai dengan pangan dan kesehatan.

Selama ini, kata Bustami, konservasi jauh dari pembangunan dan seolah-olah hanya fokus pada spesies yang dilindungi. Padahal orientasi konservasi adalah mendukung pembangunan seperti kesehatan dan pangan. Untuk itu DPD RI berpendapat perlu menambahkan Pasal 7A yang terdiri dari dua ayat.

DPD RI juga berpendapat terhadap judul RUU ini bahwa frasa “ekosistem” seyogyanya dihapus sehingga judul RUU selengkapnya berbunyi “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati”. Hal itu dikarenakan jika berbicara mengenai KSDAHE maka sudah mencakup tiga aspek, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem, yang mana ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan dalam lingkup konservasi sumber daya alam hayati. (\*)





Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat pertemuan dengan Forum Desa Pegunungan Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), di Makassar. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

## PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PINRANG

**K**epala desa yang tergabung dalam Forum Desa Pegunungan Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyampaikan aspirasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di sela-sela kunjungan kerjanya ke Makassar, pertengahan Juni 2023. Aspirasi yang mereka sampaikan terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Forum Desa Pegunungan Pinrang berharap kepada DPD RI untuk mendorong kembali pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Kerajaan Letta yang terdiri dari beberapa desa tertinggal di Kabupaten Pinrang. Mereka meminta aspirasi mereka itu disampaikan DPD RI kepada pemerintah pusat.

Dalam pertemuan dengan LaNyalla, Forum Desa Pegunungan Pinrang menyampaikan tiga aspirasi utama. *Pertama*, meminta pembangunan jembatan untuk kendaraan roda empat yang menghubungkan Desa Kariango ke Desa Bakaru yang menghubungkan Kabupaten Pinrang, Enrekang, dan Tana Toraja. Sudah ada jembatan tetapi hanya selebar 1,5 meter.

*Kedua*, mereka juga mengusulkan adanya jembatan yang menghubungkan Malimpung, Pinrang dengan Kecamatan Batulappa. *Ketiga*, perbaikan tangga tebing Ale-Ale setinggi 200 meter. Tangga tebing berada di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa yang menghubungkan Desa Letta dan Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Fasilitator Forum Desa Pegunungan Pinrang Baharuddin Makkutana menjelaskan, mereka sudah pernah menyampaikan aspirasinya ke DPD RI di Jakarta pada November 2022 saat bertemu dengan pimpinan Komite III DPD RI. Setelah pertemuan itu, sudah ada upaya dan tindakan nyata dari Pemkab Pinrang didukung Pemprov Sulsel. Namun mereka berharap pemerintah pusat turut serta mempercepat pembangunannya.

Menanggapi aspirasi tersebut, LaNyalla berkomitmen untuk memfasilitasi agar permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Pegunungan Pinrang segera terselesaikan. Karena akses transportasi sangat penting untuk memperlancar aktivitas perekonomian dan layanan lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. (\*)

## Digital Signage, Mempermudah Akses Informasi Seputar DPD RI



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi ketika meresmikan Program *Digital Signage* atau Papan Informasi DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meluncurkan program *Digital Signage* atau Papan Informasi DPD RI. Papan informasi digital tersebut diresmikan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan dihadiri sejumlah senator, pertengahan Juni 2023. Untuk saat ini, Papan Informasi Digital itu dipasang di Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Gambir.

Ketua DPD RI berharap papan informasi itu nantinya akan dipasang di sejumlah titik fasilitas publik untuk memperluas informasi mengenai kinerja DPD RI. Dengan begitu, masyarakat dapat mengontrol, menilai sekaligus menyampaikan aspirasinya untuk dapat diperjuangkan DPD RI. “Saya kira papan informasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban DPD RI kepada rakyat mengenai kinerja yang telah dilakukan,” kata LaNyalla.

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menjelaskan, peluncuran Papan Informasi DPD RI itu untuk memberikan kemudahan akses informasi yang lebih kuat kepada masyarakat sebagai target sasaran terkait kerja-kerja lembaga DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi

masyarakat daerah di tingkat nasional.

Sedangkan Kepala Biro Protokol Humas dan Media (PHM) Setjen DPD RI Mahyu Darma melaporkan, program *Digital Signage* merupakan bagian dari rencana akselerasi transformasi digital dalam membangun *brand image* DPD RI (AKSI DPD RI). Program itu akan diperluas penempatannya hingga di berbagai provinsi di Indonesia.

Peluncuran program *Digital Signage* DPD RI itu pun menuai pujian dari berbagai kalangan. Seperti dari Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara Agus Sudrajat. “Ini sebuah inovasi dalam bidang penyebaran informasi. Masyarakat perlu tahu apa yang dikerjakan DPD RI selama ini sehingga yang memilih melalui pemilu puas akan kinerja DPD RI,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Akik Dwi Suharto Rudolfus. Dirinya menilai program ini mampu mendorong masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan menjadi upaya DPD RI menginformasikan tugas, fungsi, dan kinerja kepada masyarakat. (\*)





# Kinerja Kearsipan Diganjar Penghargaan



Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir (kanan) dan Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI Nana Sutisna (kiri) bersama pejabat di lingkungan Setjen DPD RI yang menerima penghargaan kearsipan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**S**ekretariat Jenderal DPD RI mengadakan *entry meeting* pengawasan kearsipan internal tahun 2023, pertengahan Juni lalu. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan kesetjenan DPD RI. Kegiatan tersebut merupakan awal dari pengawasan dan evaluasi pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Setjen DPD RI sesuai amanat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 6 Tahun 2019.

“Pengelolaan arsip yang baik akan mendukung pelayanan sebagai informasi dan bukti akuntabilitas yang digunakan sebagai bahan penunjang kegiatan anggota DPD RI, administrasi perkantoran, maupun untuk pelayanan informasi kepada publik,” kata Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir.

Pada tahun 2022, pengawasan kearsipan internal telah dilakukan di sebelas biro/pusat/inspektorat dan tujuh kantor perwakilan DPD RI, yaitu di Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Ada dua aspek yang dinilai yaitu aspek pengelolaan arsip

dinamis (PAD) dan aspek sumber daya manusia kearsipan (SDMK). Hasil pengawasan kearsipan DPD RI tahun 2022 telah memperoleh nilai 80,08 dengan kategori A (memuaskan). Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata yang diperoleh unit pengolah biro/pusat/inspektorat di lingkungan Setjen DPD RI dan nilai eksternal dari ANRI.

Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI Nana Sutisna menyebutkan, catatan rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal tidak lepas dari peran penyelenggaraan kearsipan. Salah satunya pada unit pengolah biro/pusat/inspektorat dan unit kearsipan tingkat II pada kantor DPD RI di ibukota provinsi, khususnya dalam hal ketersediaan dan ketertiban pelaksanaan pemberkasan arsip.

“Sebagai langkah pembinaan dan evaluasi, Setjen DPD RI rutin melaksanakan pengawasan kearsipan internal setiap tahunnya dan pada tahun ini untuk pertama kalinya diberikan penghargaan kepada objek pengawasan dengan hasil penilaian terbaik dari pengawasan kearsipan internal tahun 2022,” jelas Nana Sutisna. (\*)

## Dua Pejabat Setjen DPD RI Selesai Ikuti PKN II di LAN

Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma (kanan) dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Hartawan pada acara pelepasan lulusan PKN Tingkat II Tahun 2023 di LAN. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dua pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, yaitu Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Mahyu Darma dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Hartawan telah menyelesaikan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023 di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Mereka dilepas oleh Kepala LAN Adi Suryanto di Graha Makarti Bhakti Negeri LAN, pertengahan Juni 2023.

Saat mengikuti PKN, Mahyu Darma mengusung program perubahan (*proper*) dengan nama Akselerasi Transformasi Informasi dalam Membangun *Brand Image* DPD RI (AKSI DPD RI). *Proper*-nya itu untuk melakukan perubahan dalam penyebaran informasi tentang kinerja DPD RI yang sebelumnya masih menggunakan media konvensional menjadi berbasis digital.

“Tujuannya untuk mewujudkan

kemudahan akses informasi ke masyarakat dan transparansi atas kinerja DPD RI. Selain itu, *proper* ini juga merupakan upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI, berupa transformasi digital dalam penyebaran informasi kinerja DPD RI,” jelas Mahyu Darma yang memperoleh prestasi Istimewa Peringkat I dalam PKN II Angkatan I Tahun 2023 LAN.

Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Hartawan mengusung tema Percepatan Dukungan/Layanan Bagi Anggota DPD RI di Kantor DPD RI seluruh provinsi. *Proper* yang diusungnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan berbasis digital di Setjen DPD RI, terutama di kantor-kantor perwakilan DPD RI yang berada di ibu kota provinsi. “*Proper* ini dilakukan sebagai bagian pelaksanaan desentralisasi pengelo-

luan keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dukungan/layanan keuangan bagi Anggota DPD RI,” ucapnya.

Kepala LAN Adi Suryanto menjelaskan bahwa bagi ASN, pengembangan kompetensi memiliki andil yang sangat penting. Seorang ASN harus memiliki kultur pembelajaran selain bekerja untuk membawa instansinya menjadi lebih baik. Seorang ASN tidak hanya dituntut sekedar bekerja, tetapi juga harus mampu melakukan perubahan. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada seluruh instansi untuk menyusun program pengembangan kompetensi bagi pegawai-pegawainya. (\*)







# Kolaborasi Pemerintahan Daerah untuk Pencapaian SDGs Desa : **Pengembangan Pariwisata Daerah**

**Oleh:**

Edrida Pulungan, SE. M.HI.,M.Si

(Analisis Kebijakan Muda Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Setjen DPD RI)

**B**erbagai persoalan pembangunan masyarakat ada di daerah. Kondisi tersebut bisa dilihat dari banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota DPD RI dari 34 provinsi, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan lain-lain. Untuk itu Pemerintah daerah perlu memahami akar persoalan dan perlu melakukan kolaborasi, inovasi dan implementasi kebijakan demi tercapainya target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

Kondisi perbaikan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 yang bersifat global berdampak negatif terhadap akselerasi proses pengembangan ekonomi masyarakat, salah satunya sektor pariwisata daerah yang meliputi desa wisata. Sehingga dibutuhkan kebijakan serta langkah strategis berkesinambungan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu pengembangan ekonomi lokal di daerah bisa diwujudkan dengan SDGs Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020, SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian keberadaan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, desa wisata di Indonesia telah mencapai 3.524 desa yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Ada sebanyak 1.057 desa dengan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah desa wisata tertinggi dari provinsi lainnya yakni sejumlah 310 desa. Posisi kedua adalah Pulau Sumatera yang sejumlah 919 desa. Provinsi Sumatera Barat se-

bagai penyumbang desa wisata terbesar yakni sejumlah 298 desa. Selanjutnya Pulau Sulawesi sebanyak 672 desa berada di Sulawesi Selatan dengan jumlah 419 desa. Sedangkan kunjungan wisman ke Indonesia bulan Desember 2021 berjumlah 163.619 dengan penurunan sebesar -0,28% dibandingkan bulan Desember 2020 yang berjumlah 164.079 kunjungan. Sedangkan pada tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara menurun sebesar 75,03% dari 16,11 juta kunjungan pada tahun 2019 menjadi 4,02 juta kunjungan. Secara agregat, pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga -2,07% pada tahun 2020. Kondisi ini pun berdampak pada aktivitas ekonomi desa wisata. Salah satu temuan





ilustrasi: Ist

studi mutakhir menunjukkan bahwa ditutupnya akses penerbangan ke Indonesia pada medio Maret 2020 dan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat di desa wisata.

Kebijakan Pemerintah Indonesia secara nasional telah menjadikan SDGs sebagai salah satu fokus pembangunan nasional. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York. Indonesia adalah negara pertama di Asia Pasifik yang diterjemahkan dalam 87 RPJMN dan 241 indikator SDGs dan kebijakan dengan faktor berkelanjutan pariwisata melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam hal ini, pimpinan daerah yang ada di berbagai provinsi memiliki peran penting dalam memimpin pelaksanaan SDGs serta praktik inovasi di tingkat lokal, tetapi para kepala daerah perlu kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, komunitas dan media dapat dilaksanakan model penta helix agar SDGs membumi sebagai gerakan dan inisiasi masyarakat seperti anti kemiskinan, literasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pelayanan publik.

### Pengembangan Desa Wisata Menuju SDGs

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata global, *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) menyampaikan kebijakan transformatif yang dijadikan preferensi dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif terhadap pe-

mulihan sektor pariwisata yang lebih tangguh melalui inovasi, digitalisasi, keberlanjutan, dan kemitraan.

Pemulihan sektor pariwisata seperti pengembangan desa wisata di daerah secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa untuk mendorong kemandirian desa. Pemerintah menargetkan 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, pengembangan desa wisata menjadi program prioritas nasional dalam pemulihan ekonomi yang menganut tiga aspek yaitu: *economic (prosperity)*, *ecological (planet)*, dan *social & cultural (people)*. yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atas pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal.

Penyusunan strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan dengan menggunakan PESTEL meliputi: aspek politik yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; aspek ekonomi dalam meningkatkan kontribusi PDB; aspek sosial, terkait pengembangan tenaga kerja, aspek teknologi, pemanfaatan teknologi digital media promosi dan *branding*; aspek lingkungan, pengelolaan lingkungan seperti limbah dan emisi, aspek UU, peraturan dan UU mengenai pengembangan desa wisata untuk memulihkan kembali perekonomian lokal sehingga tercapai pembangunan yang berkelanjutan. (\*)





# Sah, Sistem Proporsional Terbuka dan Kemenangan Demokrasi Indonesia

Oleh: M. Syukur/Ketua Kelompok DPD RI di MPR

Pelaksanaan pemilu 2024 sudah dipastikan tetap akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Kepastian ini diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6).

Putusan MK yang menolak gugatan terhadap sistem proporsional terbuka merupakan angin segar bagi masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah berjalan tiga kali dari pemilu 2009, 2014, dan 2019. Jika kemudian kembali ke sistem proporsional tertutup, itu merupakan langkah mundur.

Dalam setiap sistem pemilu, pasti

ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula membandingkan sistem proporsional terbuka dan tertutup, juga begitu. Maka dengan melihat iklim demokrasi di Indonesia, menggunakan sistem proporsional terbuka tentunya masih relevan untuk kehidupan politik masyarakat Indonesia.

Apalagi sejak masa reformasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, diberikan ruang sebesar-besarnya untuk menentukan figur yang dianggap pantas mewakilinya ketimbang hanya mencoblos partai politik tetapi tidak tahu siapa yang mewakilinya karena semua ditentukan oleh partai politik.

Ini yang membuat suara rakyat seperti teramputasi karena dikalahkan oleh kepentingan partai politik. Seharusnya partai politik itu cukup melakukan rekrutmen pencalonan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Setelah itu, biarkan rakyat yang memutuskan di bilik suara tentang siapa figur yang mereka pilih untuk menjadi wakilnya di DPR RI, DPD RI dan DPRD. Karena prinsip dari demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Oleh karena itu, adanya putusan MK yang tidak mengabulkan permohonan penggugat untuk kembali ke proporsional tertutup merupakan bagian dari kemenangan



nantinya bukan dari kader-kader potensial yang punya loyalitas tinggi di partai politik.

Maka untuk menghindari hal tersebut, partai politik perlu meningkatkan kualitas calon wakilnya di parlemen dengan melakukan pembinaan dan kaderisasi jauh-jauh hari sebelum pemilu, agar kader partai yang potensial dan punya kemampuan bisa mendapat dukungan dari masyarakat dan bisa berbuat di parlemen. Sehingga yang terpilih bukan kader yang hanya menumpang nyalon, tetapi tidak tahu akan perjuangan partai.

Sebelumnya, diketahui bahwa permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan.

demokrasi di Indonesia.

Dengan adanya putusan sistem proporsional terbuka, seharusnya partai politik juga tidak perlu khawatir kalau calon-calon yang terpilih

Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. (\*)



# EMPAT MAKANAN KHAS BENGKULU YANG RENYAH

## 1. Pendap

Pendap adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari bahan dasar ikan. Jenis ikan yang digunakan bisa apa saja, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Ikan yang sudah dicuci hingga bersih kemudian dibumbui dengan bumbu rempah seperti bawang putih, kencur, cabai, garam, hingga kelapa muda parut. Setelah semua bumbu dihaluskan, barulah dicampur dengan ikan. Ikan yang sudah berbalur bumbu akan dibungkus dengan daun talas dan direbus hingga matang selama 8 jam. (Kompas.com)



## 2. Bagar Hiu

Bagar hiu menggunakan daging ikan hiu, lebih tepatnya lagi adalah jenis hiu tanduk. Daging ikan hiu yang sudah dibersihkan kemudian dibumbui dengan bumbu cabai dan rempah, lalu dimasak hingga matang. Bagar hiu menjadi salah satu makanan khas Bengkulu yang pernah dicicipi oleh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. (IDN Times.com)



## 3. Rebung Asam Undak Liling

Rebung asam undak liling adalah makanan khas Bengkulu yang dibuat dari campuran dua bahan dasar, yakni keong hitam dan rebung. Untuk memasaknya dibutuhkan waktu yang agak lama karena



kita harus merendam rebungnya terlebih dahulu selama beberapa hari hingga rasa asam dalam rebung dapat keluar. Barulah setelah itu rebung dibumbui dengan aneka rempah dan dimasak bersama dengan keong hitam yang biasa hidup di sawah.

## 4. Lemang Tapai

Lemang tapai dibuat dari bahan dasar beras ketan dan santan. Untuk cara membuatnya, beras ketan yang sudah dicuci bersih lalu direndam semalaman. Setelah itu dicampur dengan santan dan dimasak dengan cara dibakar dalam seruas bambu hingga matang. Nantinya lemang tapai akan disajikan bersama dengan tapai ketan. Selain tape ketan, biasanya juga ada durian yang mendampingi sajian makanan khas Bengkulu ini. (Kooliner.com)



# Empat Destinasi Gorontalo yang Wajib Anda Kunjungi

## 1 Benteng Otanaha

Benteng Otanaha berupa benteng dengan bahan utama batu yang direkatkan dengan putih telur burung Maleo. Benteng yang dibangun oleh



Raja Ilato pada tahun 1522 ini memiliki tinggi tujuh meter dan diameter sekitar 20 meter, yang difungsikan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan. Benteng Otanaha terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pengunjung akan dapat menikmati pemandangan indah Danau Limboto dan Kota Gorontalo yang cantik dari atas ketinggian. Untuk mencapai benteng ini, pengunjung perlu mendaki 345 anak tangga, atau menaiki motor atau mobil sampai ke area parkir yang dekat benteng utama. (kompas.com)

## 2 Taman Laut Olele

Taman Laut Olele salah satu ikon wisata di Gorontalo dengan pemandangan bawah laut yang cantik dengan terumbu karang warna-



warni. Wisata bahari ini terletak di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Gorontalo. Taman laut ini sangat cocok untuk *snorkeling* dan *diving* yang sangat cocok untuk pemula karena terdapat dua tipe kedalaman, yaitu dangkal dan dalam. Pemandangan bawah laut yang indah ini memiliki beberapa *spot* seperti Goa Jin, *coral pole*, *beehive*, hingga *traffic jam*. (kompas.com)

## 3 Pulo Cinta



Pulo Cinta merupakan pulau dengan pasir berbentuk hati atau *love*, yang terletak di perairan Kabupaten Boalemo, tepatnya di Patoameme, Batumoito, Kabupaten Boalemo. Pulau alami ini digadang sebagai pulau romantis dengan jembatan yang dibentuk seperti hati lengkap dengan *eco resort* sebanyak 15 *resort*. Pengunjung dapat melakukan *snorkeling* dan *diving* atau sekadar menikmati pemandangan indah di pulau ini. Meski malam hari, pengunjung dapat menikmati pemandangan langit bertabur bintang yang berkelip cantik. (kompas.com)

## 4 Wisata Bahari Hiu Paus



Fenomena kemunculan hiu paus menjadi berkah bagi warga desa Botubarani, membawa banyak wisatawan berkunjung mengingat hiu paus yang hampir punah. Pengunjung dapat melihat hiu paus berenang di laut bebas di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolange, Gorontalo. Hiu paus di Desa Botubarani sangat jinak dan bersahabat, sehingga pengunjung dapat berenang bersama dengan hiu paus. (kompas.com)





**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

**Mengucapkan**



**Koperasi Kuat, Rakyat Berdaulat, Indonesia Hebat**  
*"Ayo Berkoperasi"*

12 JULI 1947 - 12 JULI 2023

